



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 16 Juli 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



NORMALISASI SUNGAI: Alat berat milik Dinas PUBMSDA Sidoarjo melaksanakan normalisasi di Sidoarjo, Selasa (14/7).

Musim Kemarau, Pemkab Optimalkan Normalisasi Sungai

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengoptimalkan normalisasi sungai dan pembersihan saluran irigasi pada musim kemarau sebagai langkah memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Prayitno, menyatakan kegiatan tersebut dilakukan secara terjadwal dengan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Alat Berat dan Satgas Afvoer di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan.

"Kami berharap pekerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar agar saat musim penghujan nanti seluruh aliran sungai di Sidoarjo dapat berfungsi normal, menampung curah hujan dengan maksimal," kata Prayitno dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Selasa (14/7).

Menurutnya, Satgas Alat Berat pada hari ini, Selasa (14/7),

melaksanakan normalisasi Saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, serta membersihkan saluran Kanal Porong di Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kanal Mangetan di Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, dan anak Afvoer Kedunguling di Desa Ganggakepuhsari, Kecamatan Balongbendo.

Prayitno mengatakan normalisasi Saluran Kedunguling memiliki panjang sekitar empat kilometer dengan target penyelesaian selama tiga bulan karena kondisi debit air yang menurun membuat pengerukan sedimen dan pembersihan sampah lebih efektif.

Pada saat yang sama, Satgas Afvoer dibagi ke beberapa wilayah kerja untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat di sejumlah lokasi antara lain Afvoer Kedunguling di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Afvoer Buntung di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Afvoer Kepucang di Desa Jim-

baran, Kecamatan Wonoayu, Saluran Kedunguling di Desa Temu, Kecamatan Prambon, serta beberapa afvoer di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, Porong, Gedangan, Sukodono, Buduran, Waru, dan Taman.

Selain mengeruk sedimen dan mengangkat sampah, petugas juga membersihkan tumbuhan liar yang mempersempit aliran sungai serta melakukan penguatan bibir sungai agar fungsi saluran tetap optimal menghadapi musim hujan.

Menurut Prayitno, Pemkab Sidoarjo menilai normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas tampung saluran air sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir di berbagai wilayah.

"Normalisasi sungai seperti ini merupakan upaya Pemkab Sidoarjo untuk mencegah banjir, namun persoalan banjir tidak akan pernah berakhir jika kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari sampah masih kurang," ujarnya. (udi)



AUDIENSI: Komisi C DPRD Sidoarjo mengundang perwakilan pedagang dan disperindag dalam rapat yang membahas penertiban retribusi kemarin (15/7).

Minim Sosialisasi, Pedagang Protes Penertiban Retribusi Pasar

SIDOARJO - Program penertiban pembayaran retribusi di 19 pasar milik Pemkab Sidoarjo memicu keberatan dari sebagian pedagang. Mereka mengaku kaget karena nominal retribusi yang harus dibayar mendadak lebih besar. Pedagang menilai program itu kurang disosialisasikan.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sidoarjo Muhammad Soleh mengaku banyak pedagang terkejut dengan penertiban tersebut. Sebagian pedagang merasa belum memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai pene-

rapan tarif retribusi. Menurut Soleh, penertiban penarikan retribusi dilakukan dalam kondisi tidak tepat.

"Kondisi pasar sedang sepi dan pendapatan pedagang menurun," kata Soleh. Meski memahami dasar hukumnya, Soleh berharap pemerintah tidak sekadar menagih kewajiban pedagang. Namun, juga membantu menghidupkan pusat perbelanjaan. "Kalau kondisinya membaik, pasti pedagang mau membayar sesuai ketentuan," katanya.

Plt Kepala Disperindag Sidoarjo Happy Setyaningtyas

Astrawati menjelaskan, selama ini banyak pedagang belum membayar retribusi sesuai tarif resmi. Karena itu, tahun ini pihaknya memperketat penarikan agar pembayaran sesuai dengan ketentuan. "Tidak benar ada kenaikan retribusi," ujarnya.

Menurut Happy, disetiap pasar tarif retribusi sebenarnya sebesar Rp 4.000 per hari. Namun, banyak pedagang hanya membayar separuh dari ketentuan. Bahkan, ada yang hanya membayar Rp 1.000 per hari sehingga penerimaan retribusi pasar belum optimal. (ful/hen)



IS: DPRD Sidoarjo tidak bengkel karoseri di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo.

Amari Lingkungan, DPRD Ultimatum Bengkel Balongbendo, Izin Terancam Dicabut

BALONGBENDO - Keluhan warga Desa Langkah itu dilakukan setelah warga berulang-ulang, Yti wanyajun, Thulhaui remohhau: Suphauu, Phuluu, ieleruui keuauki: U8850038888

HALAMAN /

Dewan Mediasi Perselisihan Karoseri dan Warga Seketi

Sidoarjo, Memorandum

Perselisihan antara pemilik usaha bengkel karoseri dengan masyarakat di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo dimediasi Komisi C dan Komisi A DPRD Sidoarjo.

Wakil rakyat turun bersama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-PTSP), Polsek Balongbendo, Koramil Balongbendo, Camat Balongbendo dan Kepala Desa Seketi.

Sebelum mediasi, wakil rakyat dan rombongan melakukan kunjungan ke bengkel Karoseri CV Multi Triloka Cemerlang untuk melihat kondisi bengkel yang mendapatkan keluhan dan penutupan oleh warga. Kemudian, dilanjutkan mediasi di Balai Desa Seketi, Selasa (14/7).

"Tujuan pertemuan ini mencari solusi terbaik dan saya harap semua pihak menuruti ego," ujar Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat saat memimpin mediasi di Balai Desa Seketi.

Kepala DPMPPTSP, Ridho Prasetyo menyampaikan, CV Multi Triloka Cemerlang sudah



Warga rakyat turun ke Seketi, Balongbendo untuk mediasi perselisihan warga dan karoseri.

memiliki izin dengan menggunakan OSS tahun 2023 yang belum terintegrasi. Oktober 2025 ada perubahan OSS 2025 yang sudah terintegrasi.

"Kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk melakukan

upgrade perizinan," ujarnya. Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi menjelaskan, dari OSS, ada tiga KBLI dengan resiko minim. "Ada beberapa rekomendasi dari DLHK untuk pemilik usaha agar lingkungan

terjaga dan kenyamanan masyarakat juga terjaga," jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo yang akrab Abah Dayat menambahkan, dari tuntutan masyarakat, pihaknya minta kesanggupan pemilik usaha untuk melakukan tiga hal. Pertama, jam kerja antara 07.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Kemudian melakukan upgrade perizinan agar terintegrasi sesuai dengan undang-undang dan melakukan perbaikan bengkel yang sesuai dengan standar, yaitu membangun pagar keliling minimal setinggi lima meter dan membuat pengelolaan limbah sesuai dengan arahan dan petunjuk DLHK.

Pemilik usaha, Syaiful Huda menyatakan kesanggupannya

untuk memenuhi ketiga persyaratan yang diajukan.

"Dalam jangka waktu dua bulan saya akan menyelesaikan pembangunan pagar keliling setinggi lima meter dan ditutup

atasnya," ujarnya.

Mediasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan warga dan pemilik usaha akan hasil mediasi dan warga membuka kembali bengkel. (sud/jok/fdn)

PENGUMUMAN STUDI AMDAL

RENCANA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERUMAHAN "GRAND DELTA SARI" OLEH PT GRAHA DAMAI PUTRA DI DESA WEDORO, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO

Selubungan dengan Rencana Pengembangan dan Operasional Perumahan Grand Delta Sari, PT Graha Dama Putra bermaksud menampilkan Pengumuman Penjualan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengembangan dan Operasional Perumahan Grand Delta Sari yang berlokasi di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur oleh PT Graha Dama Putra. Kegiatan proyek direncanakan terbagi menjadi beberapa area antara lain:

• Area Pembangunan Perumahan
• Area Fasilitas Pendukung: Sarana Prasarana

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka terdapat dengan keterlibatan masyarakat,

Pembuatan kegiatan diharapkan akan mendapat tanggapan masyarakat tentang dampak lingkungan hidup dapat diupayakan melalui:

• Lokasi Kegiatan
Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

**Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo**

Jalur KA di Area Tanggul Lumpur Turun 1 Meter dalam 5 Tahun

Kemenhub
Kaji Rute Baru

SIDOARJO – Masih munculnya semburan di kawasan Lumpur Sidoarjo berdampak pada kondisi jalur kereta api (KA). Selama lima tahun, elevasi rel di Kecamatan Porong turun satu meter. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) kaji rute baru untuk kereta ke arah selatan.

Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan menjelaskan, sejak dalam dua dekade terakhir setidaknya sudah ada beberapa kali peningkatan hingga hampir tiga meter. Namun, selama 2021-2026 terjadi penurunan tanah sekitar satu meter dari permukaan air laut. Hal ini bisa memicu adanya gangguan perjalanan kereta ke arah selatan.

"Ini menandakan stabilitas trek di jalur Porong ini sudah kritis," katanya. Hal tersebut membuat peningkatan maupun pengembangan infrastruktur di lokasi itu dinilai sudah tidak lagi bisa dilakukan.

Melewati Tulangan

Menurut Denny, perbaikan yang bisa dilakukan hanya memadatkan batu dan menaikkan sedikit rel, sehingga geometri rel rata. Sejumlah langkah pendek dan panjang juga disiapkan BTP. "Untuk langkah pendek, kami masih coba koordinasi dengan pihak-pihak mulai PPLS hingga pemda," katanya.

Untuk jangka menengah dan panjang, DJKA meny-

RUTE ALTERNATIF KERETA API

Surabaya-Stasiun Buduran-Stasiun Sidoarjo-Stasiun Tulangan (Pasuruan)



PROSES PEMINDAHAN JALUR

- Jalur baru tidak melewati Tanggulangin
- Ada pembangunan rel
- Seluruh sertifikat lahan untuk pembangunan siap
- Pembangunan dilakukan setelah SRRL



Sumber: Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya



JALUR STRATEGIS: Kereta api melintasi rel di kawasan tanggul lumpur Sidoarjo, Porong. Turunnya ketinggian jalur KA berpotensi menyebabkan kecelakaan.

apkan kajian relokasi jalur kereta jalur selatan. Rute yang dikaji melewati Sidoarjo, Tulangan, hingga Gunung Gangsir yang masuk wilayah Pasuruan.

Saat ini, sebagian besar lahan yang direncanakan un-

tuk jalur baru Sidoarjo-Pasuruan sudah klar. "Sudah milik DJKA lahannya," katanya. Nantinya, jalur akan dipasang rel baru. "Kami masih cek soal relokasi, termasuk soal reaktivasi Stasiun Gunung Gangsir," paparnya. (eza/hen)

Jawa Pos

Daging Sapi Tembus Rp 130 Ribu per Kilo

Pedagang Pasar
Porong Pilih Libur

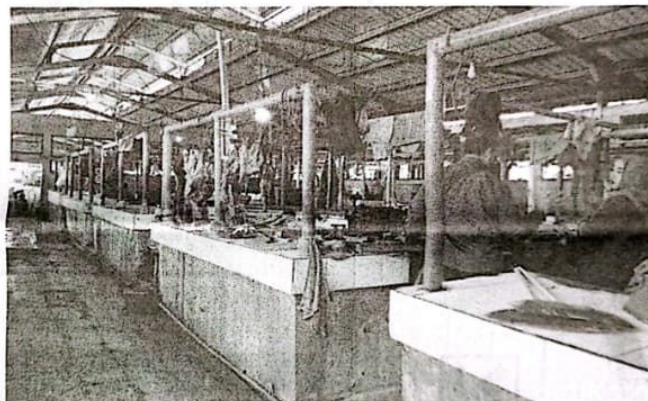
Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Harga daging sapi di Pasar Porong, Sidoarjo terus merangkak naik hingga tembus Rp 130 ribu/kg. Kenaikan harga yang terjadi beberapa kali dalam 3 bulan terakhir membuat sejumlah pedagang memilih libur tidak berjualan karena khawatir rugi.

Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Porong, Syaiful, mengatakan harga daging terus mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun drastis.

"Harga daging biasa sekarang Rp 130 ribu/kg. Kalau daging pilihan bisa mencapai Rp 135 ribu hingga Rp 140 ribu/kg. Pembeli sekarang sangat sepi," ujar Syaiful di pasar Porong, Rabu (15/7/2016).

Ia menjelaskan, kenaikan harga terjadi tiga kali dalam tiga bulan terakhir. Sebelumnya harga daging masih berada di kisaran Rp 100



Pedagang daging sapi yang sepi di pasar baru porong.

ribu/kg, kemudian naik bertahap Rp 5 ribu, menjelang Ramadan naik lagi Rp 5 ribu, dan terakhir melonjak sekitar Rp 10 ribu/kg.

Menurut Syaiful, kondisi pasar semakin sulit sejak awal 2016. Jika dulu dalam sehari pedagang mampu menjual hingga tiga sampai empat ekor sapi, kini satu ekor pun belum tentu habis terjual. "Penjualan turun sangat jauh. Dulu ramai,

sekarang pembeli berkurang terus. Modal naik, untung hampir tidak ada, bahkan kadang rugi," katanya.

Pedagang lainnya, Ira, juga merasakan dampak kenaikan harga tersebut. Ia mengaku banyak pedagang memilih mengurangi stok bahkan tidak berjualan karena khawatir daging tidak laku.

"Kalau dipaksakan ambil banyak, nanti tidak habis terjual. Sekarang

kami ambil sedikit saja karena harga sudah tinggi," ujar Ira.

Menurut Ira, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada daging sapi, tetapi juga jeroan seperti hati, paru, limpa, dan bagian lainnya yang ikut mengalami kenaikan sekitar Rp 5 ribu/kg.

Para pedagang berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Perdagangan segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga pasokan sapi potong agar harga tidak terus melonjak. "Kami berharap pemerintah bisa membantu menstabilkan harga. Kalau harga terus naik, masyarakat semakin berat membeli dan pedagang juga semakin sulit berjualan," pungkas Ira.

Kenaikan harga daging sapi ini sejalan dengan kondisi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Setelah Idul Adha, harga daging justru kembali naik akibat pasokan sapi siap potong yang menipis, sehingga harga di pasar tradisional kini berkisar antara Rp 120 ribu hingga Rp 140 ribu/kg, bergantung pada kualitas daging. (md/rus)

BERITA METRO
www.beritametro.id

Peninggian Jalan Dipercepat Guna Atasi Banjir

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempercepat peninggian Jalan Raya Bluru Kidul, di Kecamatan Sidoarjo, sebagai upaya mengatasi banjir, memperlancar akses menuju pusat pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.

Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau lokasi proyek di Sidoarjo, Senin, menyatakan pekerjaan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) harus dipastikan berjalan sesuai target.

"Peninggian Jalan Bluru Kidul ini menjadi prioritas karena kawasan tersebut kerap tergenang saat musim hujan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat menuju pusat pelayanan publik," kata Subandi dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Senin (13/7).

Menurutnya, pemerintah

daerah mengalihkan sebagian alokasi anggaran dari penangan jalan di Kecamatan Sedati agar proyek tersebut dapat segera dilaksanakan mengingat urgensi penanganan banjir di kawasan sekitar.

Ia menjelaskan, peningkatan jalan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan badan jalan, tetapi juga disertai pembenahan sistem drainase agar aliran air menuju saluran pembuangan akhir dapat berfungsi secara optimal.

Ruas jalan tersebut, dikatakannya, juga diperlebar menjadi 11 meter dengan beton selebar enam meter serta dilengkapi bahu jalan dan trotoar di kedua sisi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pemkab Sidoarjo, lanjutnya, juga menyusun Detail Engineering Design (DED) sistem pembuangan air menuju sungai, termasuk mengkaji pemban-

gunan tanggul sebagai langkah antisipasi terhadap banjir rob.

Selain pembangunan fisik, Subandi menyebut pemerintah daerah akan menata kawasan dengan mengembalikan fungsi badan dan bahu jalan sebagai ruang lalu lintas serta mendata bangunan yang berada di ruang milik jalan melalui pendekatan persuasif bersama pemerintah desa dan pengurus lingkungan.

Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan harapan mampu mengurangi genangan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.

"Kontraktor wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal asal Sidoarjo sehingga pembangunan infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," ujar Subandi. (udi)



PENINGGIAN JALAN: Bupati Sidoarjo Subandi (tengah) saat meninjau lokasi proyek peninggian Jalan Raya Bluru Kidul, di Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Senin (13/7).



BM/15T

NORMALISASI SUNGAI: Alat berat milik Dinas PUBMSDA Sidoarjo melaksanakan normalisasi di Sidoarjo, Selasa (14/7).

Musim Kemarau, Pemkab Optimalkan Normalisasi Sungai

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengoptimalkan normalisasi sungai dan pembersihan saluran irigasi pada musim kemarau sebagai langkah memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Prayitno, menyatakan kegiatan tersebut dilakukan secara terjadwal dengan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Alat Berat dan Satgas Afvoer di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan.

"Kami berharap pekerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar agar saat musim penghujan nanti seluruh aliran sungai di Sidoarjo dapat berfungsi normal, menampung curah hujan dengan maksimal," kata Prayitno dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Selasa (14/7).

Menurutnya, Satgas Alat Berat pada hari ini, Selasa (14/7),

melaksanakan normalisasi Saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, serta membersihkan saluran Kanal Porong di Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kanal Mangetan di Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, dan anak Afvoer Kedunguling di Desa Ganggangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo.

Prayitno mengatakan normalisasi Saluran Kedunguling memiliki panjang sekitar empat kilometer dengan target penyelesaian selama tiga bulan karena kondisi debit air yang menurun membuat pengerukan sedimen dan pembersihan sampah lebih efektif.

Pada saat yang sama, Satgas Afvoer dibagi ke beberapa wilayah kerja untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat di sejumlah lokasi antara lain Afvoer Kedunguling di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Afvoer Buntung di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Afvoer Kepucang di Desa Jim-

baran, Kecamatan Wonoayu, Saluran Kedunguling di Desa Temu, Kecamatan Prambon, serta beberapa afvoer di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, Porong, Gedangan, Sukodono, Buduran, Waru, dan Taman.

Selain mengeruk sedimen dan mengangkat sampah, petugas juga membersihkan tumbuhan liar yang mempersempit aliran sungai serta melakukan penguatan bibir sungai agar fungsi saluran tetap optimal menghadapi musim hujan.

Menurut Prayitno, Pemkab Sidoarjo menilai normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas tampung saluran air sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir di berbagai wilayah.

"Normalisasi sungai seperti ini merupakan upaya Pemkab Sidoarjo untuk mencegah banjir, namun persoalan banjir tidak akan pernah berakhir jika kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari sampah masih kurang," ujarnya. (udi)



M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

AUDIENSI: Komisi C DPRD Sidoarjo mengundang perwakilan pedagang dan disperindag dalam rapat yang membahas penertiban retribusi kemarin (15/7).

Minim Sosialisasi, Pedagang Protes Penertiban Retribusi Pasar

SIDOARJO – Program penertiban pembayaran retribusi di 19 pasar milik Pemkab Sidoarjo memicu keberatan dari sebagian pedagang. Mereka mengaku kaget karena nominal retribusi yang harus dibayar mendadak lebih besar. Pedagang menilai program itu kurang disosialisasikan.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sidoarjo Muhammad Soleh mengaku banyak pedagang terkejut dengan penertiban tersebut. Sebagian pedagang merasa belum memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai pene-

rapan tarif retribusi. Menurut Soleh, penertiban penarikan retribusi dilakukan dalam kondisi tidak tepat.

"Kondisi pasar sedang sepi dan pendapatan pedagang menurun," kata Soleh. Meski memahami dasar hukumnya, Soleh berharap pemerintah tidak sekadar menagih kewajiban pedagang. Namun, juga membantu menghidupkan pusat perbelanjaan. "Kalau kondisinya membaik, pasti pedagang mau membayar sesuai ketentuan," katanya.

Plt Kepala Disperindag Sidoarjo Happy Setyaningtyas

Astrawati menjelaskan, selama ini banyak pedagang belum membayar retribusi sesuai tarif resmi. Karena itu, tahun ini pihaknya memperketat penarikan agar pembayaran sesuai dengan ketentuan. "Tidak benar ada kenaikan retribusi," ujarnya.

Menurut Happy, disekeliling pasar tarif retribusi sebenarnya sebesar Rp 4.000 per hari. Namun, banyak pedagang hanya membayar separuh dari ketentuan. Bahkan, ada yang hanya membayar Rp 1.000 per hari sehingga penerimaan retribusi pasar belum optimal. (ful/hen)

Jawa Pos

Kabid Pembangunan Jalan Bungkam Betonisasi Bluru Kidul Tidak Transparan Publik, Bupati Subandi Warning Proyek



Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memacu pembangunan infrastruktur demi mendongkrak kualitas pelayanan publik sekaligus menuntaskan persoalan genangan air di sejumlah wilayah strategis. Salah satu proyek prioritas yang tengah dikebut

saat ini adalah peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul, senilai 21,444 miliar an yang dikerjakan oleh PT Tjkrindo Menganti. Sedangkan Joko Kabid Peningkatan Jalan bungkam saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp siapa yang kerjakan proyek Bluru Kidul- Sidoklumpuk tidak ada azas transparansi publik. Hal ini dibuktikan langsung saat wartawan Pojok Kiri investigasi lokasi tidak ada transparansi publik tentang anggaran proyek tersebut karena tidak dipasang papan nama sesuai amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 14 thn 2008. Sementara guna memastikan proyek berjalan sesuai target, Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau

langsung lokasi pengerjaan dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) serta jajaran Forkopimka, Senin (13/7/2026). Inspeksi mendadak ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mengawal proyek agar selesai tepat waktu dan berdampak instan bagi masyarakat.

Bupati Subandi menyatakan, Jalan Raya Bluru Kidul mendapat atensi khusus karena selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. Padahal, ruas tersebut merupakan urat nadi menuju pusat pelayanan publik, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo.

"Peningkatan Jalan Bluru Kidul ini prioritas utama karena setiap musim hujan kawasan ini selalu tergenang. Akses warga menuju pusat pelayanan jadi lumpuh. Karena itu, penanganannya wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi," ujar Subandi di sela-sela peninjauan. Ia membeberkan, saking mendesaknya proyek ini, Pemkab Sidoarjo bahkan melakukan pengalihan alokasi anggaran (shifting budget) yang semula diplot untuk penanganan jalan. (Khol)



TEGAS: DPRD Sidoarjo sidak bengkel karoseri di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo.

Cemari Lingkungan, DPRD Ultimatum Bengkel di Balongbendo, Izin Terancam Dicabut

BALONGBENDO-Keluhan warga Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, terkait kebisingan mesin produksi dan dugaan pencemaran limbah cat dari sebuah bengkel karoseri akhirnya mendapat respons tegas.

DPRD Sidoarjo turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memediasi warga dengan pihak pengusaha. Hasilnya, pengusaha diberi waktu dua bulan untuk memenuhi sejumlah tuntutan. Jika mengabaikan kesepakatan tersebut, izin usahanya terancam dicabut.

Sidak yang digelar melibatkan Komisi C dan Komisi A DPRD Sidoarjo bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Balongbendo.

Langkah itu dilakukan setelah warga berulang kali mengeluhkan aktivitas produksi yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Muhammad Abud Asyrofi mengatakan, hasil sidak membuktikan keluhan masyarakat memang terjadi di lapangan. Aktivitas produksi dinilai telah melewati batas kewajaran dan mengganggu warga sekitar.

"Temuan di lapangan mengonfirmasi kebenaran dari laporan masyarakat. Suara bising dari aktivitas produksi itu bahkan melebihi jam kerja pada umumnya. Jelas ini mengganggu waktu istirahat warga. Ditambah lagi ada kekhawatiran serius terkait dampak limbah cat terhadap lingkungan sekitar," ujarnya.

● Ke Halaman 10

radarsidoarjo.id 031-5828 0826 radarsidoarjo@gmail.com Radar Sidoarjo radarsidoarjo



Cemari Lingkungan,...

Untuk meredam konflik, DPRD kemudian memfasilitasi mediasi yang mempertemukan pihak perusahaan, perwakilan warga, Pemerintah Desa Seketi, serta instansi teknis terkait.

Dari pertemuan tersebut, lahir sejumlah kesepakatan yang wajib dipenuhi pihak pengusaha. Di antaranya mengevaluasi jam operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat warga, membangun pagar atau tembok pembatas guna meredam kebisingan, serta memastikan pengelolaan limbah cat dan emisi udara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

"Operasional bisnis berjalan silakan, tetapi jangan sampai merugikan ruang hidup warga sekitar," tegas Abud.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menegaskan, meski bengkel karoseri tersebut telah mengantongi izin usaha sejak 2023, hal itu bukan berarti pengusaha bisa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.

"Secara administrasi usaha tersebut memang telah mengantongi perizinan. Namun, keberadaan izin saja tidak cukup apabila pengusaha mengabaikan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha," kata Choirul, Rabu (15/7).

Menurut Choirul, salah satu persoalan yang muncul adalah minimnya

komunikasi antara pemilik usaha dengan warga sejak awal operasional.

"Meskipun izin usaha sudah lengkap dari tahun 2023, namun pihak pengusaha kurang mensosialisasikan kepada warga. Jadi mengantongi izin saja saya rasa kurang cukup, harus memperdulikan warga sekitar," jelasnya.

Dalam mediasi itu, warga meminta pengusaha melakukan langkah nyata untuk mengurangi dampak polusi. Permintaan tersebut disambut dengan komitmen membangun fasilitas yang lebih memadai.

"Pengusaha ada tuntutan dari warga untuk mengurangi polusi. Itu akan memagar dan membentuk gedung. Alhamdulillah pengusaha juga siap, tidak hanya membangun gedung, tapi

untuk pengecatan ada gedung tersendiri," ungkap Choirul.

Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah kecamatan dan kepolisian akan mengawasi pelaksanaan seluruh kesepakatan tersebut. Pengusaha diberi tenggat waktu selama dua bulan untuk merealisasikan komitmennya.

"Kemarin pihak Pak Kapolsek dan Pak Camat akan memantau. Apabila sampai dalam waktu dua bulan tidak ada itikad baik dari pihak pengusaha, maka dari pihak perizinan siap mencabut izin usaha tersebut," tegasnya.

Choirul berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara bijak tanpa merugikan salah satu pihak.

"Pada intinya semua pihak, baik pengusaha maupun warga, harus

menurunkan ego masing-masing. Keberadaan UMKM atau industri lokal ini tetap harus kita dukung penuh. Tetapi, seluruh ketentuan dan regulasi lingkungan juga wajib dipatuhi tanpa pengecualian," tuturnya. (dik/vga)

Iklan Baris

Delta Cekli

KEHILANGAN

HILANG BPKB ASLI YAMAHA, TAUN 2016, L 5270 NC, WARNA PUTIH, NOKA MH3SE99106J009886 NO SIN, ET1E0009874 AN, ERNI SURYANI HASTUTI

Pasang iklan cekli? Hub: 08132217588 (lmas)



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Usaha Karoseri Kembali Beroperasi, DPRD Sidoarjo Berhasil Mediasi warga dan Pengusaha

Sidoarjo, Pojok Kiri

Perselisihan antara pemilik usaha bengkel karoseri dengan masyarakat di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo akhirnya berhasil di mediasi oleh Komisi C dan komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bersama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Perizinan Sidoarjo, Polsek Balongbendo, Koramil Kecamatan Balongbendo, Camat Balongbendo dan Kepala Desa Seketi melakukan kunjungan ke bengkel karoseri CV Multi Triloka Cemerlang untuk melihat kondisi bengkel yang mendapatkan keluhan dan penutupan sepihak oleh warga dilanjutkan dengan mediasi di Balai Desa Seketi, Selasa (14/7/2026).

"Tujuan untuk pertemuan hari ini adalah menjadi solusi terbaik dan saya harapkan semua pihak baik masyarakat maupun pengusaha untuk sama-sama menurunkan ego," jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo Choirul Hidayat, S.H. saat memimpin mediasi



Mediasi DPRD dan pengusaha Karoseri di kantor balai desa Seketi.

di Balai Desa Seketi.

Dayat menjelaskan pemerintah sangat mendukung adanya pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan.

Ditempat yang sama, Kepala DPMPTSP, Ridho Prasetyo menyampaikan bahwa CV Multi Triloka Cemerlang sudah mempunyai izin dengan menggunakan OSS Tahun 2023 yang belum

terintegrasi. Sedangkan di pada Oktober 2025 ada perubahan OSS 2025 yang sudah terintegrasi.

"Kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk melakukan upgrade perizinan," jelasnya Ridho.

Sedangkan Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi menjelaskan dari OSS, ada tiga KBLI dengan resiko minim.

"Ada beberapa rekomendasi dari DLHK untuk pemilik usaha agar lingkungan tetap terjaga dan kenyamanan masyarakat juga

terjaga," tuturnya.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi C yang akrab Abah Dayat menjelaskan dari tuntutan masyarakat, pihaknya minta kesanggupan pemilik usaha untuk melakukan tiga hal, yang pertama jam kerja antara 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, melakukan upgrade perizinan agar terintegrasi sesuai dengan undang-undang dan melakukan perbaikan bengkel yang sesuai dengan standar, yaitu membangun pagar keliling minimal setinggi lima meter dan membuat pengelolaan limbah sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DLHK.

Pemilik usaha, Syaiful Huda menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi ketiga persyaratan yang diajukan.

"Dalam jangka waktu dua bulan saya akan menyelesaikan pembangunan pagar keliling setinggi lima meter dan ditutup atasnya," ujarnya.

Dalam mediasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan warga dan pemilik usaha akan hasil mediasi dan warga membuka kembali bengkel.(dy/khol)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Mediasi Perselisihan Karoseri dan Warga Seketi

Sidoarjo, Memorandum

Perselisihan antara pemilik usaha bengkel karoseri dengan masyarakat di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo dimediasi Komisi C dan Komisi A DPRD Sidoarjo.

Wakil rakyat turun bersama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Polsek Balongbendo, Koramil Balongbendo, Camat Balongbendo dan Kepala Desa Seketi.

Sebelum mediasi, wakil rakyat dan rombongan melakukan kunjungan ke bengkel Karoseri CV Multi Triloka Cemerlang untuk melihat kondisi bengkel yang mendapatkan keluhan dan penutupan oleh warga. Kemudian, dilanjutkan mediasi di Balai Desa Seketi, Selasa (14/7).

"Tujuan pertemuan ini mencari solusi terbaik dan saya harap semua pihak menurunkan ego," ujar Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat saat memimpin mediasi di Balai Desa Seketi.

Ia menjelaskan pemerintah sangat mendukung pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan.

Kepala DPMPTSP, Ridho Prasetyo menyampaikan, CV Multi Triloka Cemerlang sudah



Warga rakyat turun ke Seketi, Balongbendo untuk memediasi perselisihan warga dan karoseri.

mempunyai izin dengan menggunakan OSS tahun 2023 yang belum terintegrasi. Oktober 2025 ada perubahan OSS 2025 yang sudah terintegrasi.

"Kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk melakukan

upgrade perizinan," ujarnya.

Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi menjelaskan, dari OSS, ada tiga KBLI dengan risiko minim. "Ada beberapa rekomendasi dari DLHK untuk pemilik usaha agar lingkungan

tetap terjaga dan kenyamanan masyarakat juga terjaga," jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo yang akrab Abah Dayat menambahkan, dari tuntutan masyarakat, pihaknya minta kesanggupan pemilik usaha untuk melakukan tiga hal. Pertama, jam kerja antara 07.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Kemudian melakukan upgrade perizinan agar terintegrasi sesuai dengan undang-undang dan melakukan perbaikan bengkel yang sesuai dengan standar, yaitu membangun pagar keliling minimal setinggi lima meter dan membuat pengelolaan limbah sesuai dengan arahan dan petunjuk DLHK.

Pemilik usaha, Syaiful Huda menyatakan kesanggupannya

untuk memenuhi ketiga persyaratan yang diajukan.

"Dalam jangka waktu dua bulan saya akan menyelesaikan pembangunan pagar keliling setinggi lima meter dan ditutup

atasnya," ujarnya.

Mediasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan warga dan pemilik usaha akan hasil mediasi dan warga membuka kembali bengkel (*sud/jok/tin*)

PENGUMUMAN STUDI AMDAL RENCANA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERUMAHAN 'GRAND DELTA SARI' OLEH PT. GRAHA DAMAI PUTRA DI DESA WEDORO, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO

Selubungan dengan Rencana Pengembangan dan Operasional Perumahan Grand Delta Sari, PT. Graha Dama Putra bermaksud menyampaikan Pengumuman Penyusunan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengembangan dan Operasional Perumahan Grand Delta Sari yang berlokasi di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur oleh PT. Graha Dama Putra. Kegiatan proyek direncanakan terbagi menjadi beberapa area antara lain:

- Area Pembangunan Perumahan
- Area Fasilitas Pendukung: Sarana Prasarana
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terkait dengan keterlibatan masyarakat, Pemrakarsa kegiatan mengharapakan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tentang dampak lingkungan hidup dapat disampaikan melalui:

• Lokasi Kegiatan
Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

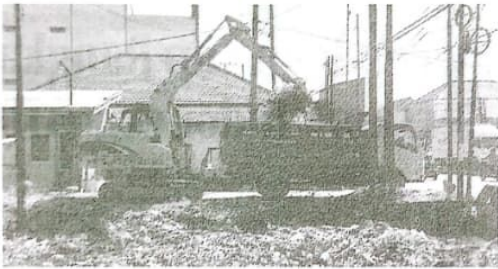


INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Genjot Normalisasi Sungai dan Pembersihan Afur

Sidoarjo, Memorandum
Normalisasi sungai dan pembersihan afvoer digenjot oleh Pemkab Sidoarjo saat musim kemarau sekarang ini. Tujuannya, supaya aliran air lancar dan tidak terjadi banjir saat musim penghujan.
Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo menerjunkan Satgas Alat Berat dan Satgas Afur. Alat-alat berat sudah terjun di titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan.
Begitu pula dengan puluhan Satgas Afur. Mereka terus bekerja keras membersihkan saluran-saluran irigasi. Kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan afvoer sudah terjadwal.
Selasa (14/7), Satgas Alat Berat melakukan normalisasi saluran



Normalisasi sungai digenjot Pemkab Sidoarjo.

Kedunguling di Kelurahan Gebang Sidoarjo. Mereka melakukan pembersihan sampah saluran Porong Kanal Kelurahan Porong dan saluran Mangetan Kanal Desa Dungus.

Satgas Alat Berat juga berge-

rak menormalisasi anak afvoer Kedunguling Desa Ganggankepuhari.
Satgas Afur berpencar melakukan pembersihan saluran-saluran irigasi yang tersumbat. Dinas PU Bina Marga dan

SDA Sidoarjo membagi Satgas Afur per wilayah. Antara lain Satgas Afur Wilayah Kota, Satgas Afvoer UPTD Trosobo, Prambon, Porong dan Satgas Afur UPTD Sumpat.
Untuk wilayah kota, membersihkan afur Kedunguling Desa Larangan. Sedang Satgas Afvoer UPTD Trosobo melakukan pembersihan Afvoer Buntung Desa Balongbendo, Afur Kepucang Desa Jimbaran Wonoayu dan Saluran Kedunguling Desa Temu Prambon. Pembersihan Saluran Kedunguling Desa Temu Prambon juga dilakukan Satgas Afur UPTD Prambon.
Sedangkan Satgas Afur UPTD Porong melakukan pembersihan Afur Gedek Desa Wates Tanggulangin. Afur Ngingas Desa

Balongtani Jabon dan Afvoer Kedungkampil Desa Kedungsulo Porong.
Satgas Afur UPTD Sumpat melakukan pembersihan Afvoer di lima kecamatan. Yakni Afvoer Bulubendo Desa Sawotratap Gedangan. Afvoer Sumber Desa Klopolepuluh Sukodono. Afvoer Karangbong 2 Desa Wadungasih Buduran serta Afvoer Botokan atau Sinir Desa Pepelegi Waru.
Satgas Afur UPTD Sumpat bergerak membersihkan Afur Buntung Desa Wadungasri Waru dan Afvoer Jemundo Desa Kedungnuri Taman.
Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Prayitno, mengatakan normalisasi sungai dan pembersihan afvoer terus berjalan. (hum/jok/fdn)

Lokasi kegiatan
Desa Wadono, Kecamatan
Pembakarsa
PT. Graha Damai PU
Kec. Cempaka Putih
No. Telp. 021888866
Instansi Terkait
Dinas Lingkungan Hidup
Buduran, Sidoarjo, Telp.
Tim Penyusun AMD
Alamat: Ruko Dewa S
61252, Telp. +62 812-
Kegiatan ini diperkirakan
• Tersedianya perumahan
• Peningkatan sarana C
• Peningkatan peluang
Kegiatan ini diperkirakan
• Debu dan penurunan
pemagaran area pro
konstruksi.
• Timbulan limbah cair
• Timbulan sampah, c
selanjutnya pengang
Saran, pendapat dan t
atas dalam waktu 10 (a

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Kemarau, Pemkab Genjot Normalisasi Sungai, Saluran Kedunguling Jadi Prioritas

Truk Engkel Terjun ke Sungai di Gedangan

GEDANGAN-Sebuah truk engkel mengalami kecelakaan tunggal hingga terjun ke sungai di Jalan Raya Sedati-Gedangan, tepatnya di depan Balai Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (15/7). Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

Kapolsek Gedangan Kompol Anak Agung Gede Putra Wisnawati mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan diduga terjadi karena rem mendadak.



KOTA-Musim kemarau dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mempercepat normalisasi sungai dan pembersihan saluran irigasi.

Kondisi debit air yang menurun dinilai menjadi waktu paling ideal untuk mengeruk sedimen, mengangkat sampah, hingga memperkuat bibir sungai sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan.

Salah satu fokus utama saat ini adalah normalisasi Saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo. Pekerjaan sepanjang sekitar empat kilometer itu diperkirakan berlangsung selama tiga bulan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya

Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Prayitno mengatakan, normalisasi sungai pada musim kemarau jauh lebih efektif karena kondisi air yang surut memudahkan proses pengerukan di lapangan.

"Normalisasi sungai di musim kemarau seperti ini sangat efektif karena debit air menurun yang memudahkan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah," ujar Prayitno, Rabu (15/7).

Ini menjelaskan, pengerjaan tidak hanya sebatas mengeruk sedimen tanah dan membersihkan sampah yang menghambat aliran air.

Tumbuhan liar yang mempersempit badan sungai juga dibersihkan. Bahkan, penguatan bibir sungai turut

● Ke Halaman 10



Kemarau, Pemkab Genjot...

dilakukan bersamaan dengan proses normalisasi. Menurut Prayitno, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kapasitas sungai agar tetap optimal saat intensitas hujan kembali meningkat.

"Kita berharap pekerjaan normalisasi sungai ini berjalan lancar agar saat musim penghujan nanti seluruh aliran sungai di Sidoarjo dapat berfungsi normal dan mampu menampung curah hujan secara maksimal," katanya.

Untuk mempercepat pekerjaan, DPU-

BMSDA menerjunkan Satgas Alat Berat dan Satgas Afvoer ke berbagai titik. Alat berat difokuskan pada sungai dan saluran yang mengalami pendangkalan, sedangkan Satgas Afvoer membersihkan saluran irigasi yang tersumbat.

Pada Rabu (15/7), Satgas Alat Berat selain melanjutkan normalisasi Saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang juga melakukan pembersihan sampah di Saluran Porong Kanal, Kelurahan Porong, serta Saluran Mangetan Kanal di Dusun Dungus, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono. Material hasil pengerukan kemudian diangkut meng-

gunakan spoilbak menuju TPA Jabon.

Tim alat berat juga melakukan normalisasi anak Afvoer Kedunguling di Desa Ganggangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo.

Sementara itu, Satgas Afvoer dibagi ke sejumlah wilayah kerja, meliputi wilayah Kota, UPTD Trosobo, Prambon, Porong, dan Sumpat.

Di wilayah Kota, petugas membersihkan Afvoer Kedunguling di Desa Laranagan, Kecamatan Candi. UPTD Prambon menangani Afvoer Gedangkutuk di Desa Kendalsewu, Kecamatan Tarik.

UPTD Trosobo membersihkan Afvo-

er Sidoarjo di Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, Afvoer Wilayat di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, serta Afvoer Bader di Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonorejo.

Kemudian UPTD Porong melakukan pembersihan Afvoer Bahgepek di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Afvoer Ngingas di Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon, dan Afvoer Kedungkampil di Desa Kedungsole, Kecamatan Porong.

Sedangkan UPTD Sumpat bergerak membersihkan Afvoer Bulubendo di Desa Sawotratap, Kecamatan Ge-

dangan. Afvoer Sumber di Desa Klopo-sepuluh, Kecamatan Sukodono, Afvoer Karangbong 2 di Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Afvoer Botokan atau Sinir di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Afvoer Buntung di Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, serta Afvoer Jemundo di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman.

DPUBMSDA memastikan kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan afvoer akan terus dilakukan secara bertahap sesuai jadwal guna mengurangi risiko banjir saat musim penghujan tiba. (dik/vga)





Pemkab Sidoarjo Genjot Normalisasi Sungai di Musim Kemarau

Sidoarjo, Pojok Kiri

Bukan cuma saat musim penghujan, normalisasi sungai dan pembersihan afvoer juga terus digenjot oleh Pemkab Sidoarjo saat musim kemarau seperti sekarang ini. Tujuannya, supaya aliran air lancar dan tidak terjadi banjir saat penghujan.

Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo menerjunkan Satgas Alat Berat dan Satgas Afvoer. Alat-alat berat sudah terjun titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan. Begitu pula dengan puluhan orang Satgas Afvoer. Mereka terus bekerja keras membersihkan saluran-saluran irigasi.

Kegiatan normalisasi sungai dan pembersihan afvoer sudah terjadwal. Seperti hari ini, Selasa, (14/7/2026), Satgas Alat Berat melakukan normalisasi saluran Kedunguling di Kelurahan Gebang Sidoarjo. Jadwal hari ini juga mereka melakukan pembersihan sampah saluran Porong Kanal Kelurahan Porong dan saluran Mangetan Kanal Desa Dungus.

Selain itu Satgas Alat Berat juga bergerak menormalisasi anak afvoer Kedunguling Desa Ganggankepuhsari di Kecamatan Balongbendo.

Di hari yang sama, Satgas Afvoer berpencar melakukan pembersihan saluran-saluran irigasi yang tersumbat. Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo membagi Satgas Afvoer per wilayah. Antara lain Satgas Afvoer Wilayah Kota, Satgas Afvoer UPTD Trosobo, Prambon, Porong dan Satgas Afvoer UPTD Sumpat.

Untuk Satgas Afvoer wilayah kota, hari ini membersihkan afvoer Kedunguling Desa Larangan. Sedangkan untuk Satgas Afvoer UPTD Trosobo melakukan pembersihan Afvoer Buntung Desa Balongbendo, Afvoer Kepucang Desa Jimbaran Wonoayu dan Saluran Kedunguling Desa Temu Prambon. Pembersihan Saluran Kedunguling Desa Temu Prambon hari ini juga dilakukan Satgas Afvoer UPTD Prambon.

Sedangkan Satgas Afvoer UPTD Porong melakukan pembersihan Afvoer Gedek Desa Wates Tanggulangin, Afvoer Ngingas Desa Balongtani Jabon dan Afvoer Kedungkampil Desa Kedungsulo Porong.

Satgas Afvoer UPTD Sumpat sendiri melakukan pembersihan Afvoer di lima kecamatan. Yakni Afvoer Bulubendo Desa Sawotratap Gedangan, Afvoer Sumber Desa Klopsepuluh Sukodono, Afvoer Karangbong 2 Desa Wadungasih Buduran serta Afvoer Botokan atau Sinir Desa Pepelegi Waru. (Khol/ Dy)

Polusi Picu Warga Segel Karoseri

► DPRD Beri Tengat Dua Bulan Benahi Polusi

SIDOARJO, SURYA - Usaha karoseri di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, disegel warga setelah aktivitas produksinya dituding menimbulkan polusi debu dan bau cat yang mengganggu kesehatan serta kenyamanan lingkungan.

Operasional bengkel yang berada di dekat permukiman padat penduduk itu sempat dihentikan paksa hingga ada solusi yang disepakati bersama.

Merespons konflik tersebut, Komisi C dan Komisi A DPRD Sidoarjo bersama pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, serta dinas terkait melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Usai peninjauan, kedua belah pihak dipertemukan dalam forum mediasi di Kantor Desa Seketi.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Khoirul Hidayat, menjelaskan secara administratif usaha karoseri tersebut telah mengantongi izin operasional sejak 2023. Namun, legalitas itu tidak menghapus kewajiban perusahaan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar.

Dari hasil mediasi, tercapai kesepakatan baru antara

ra warga dan pemilik usaha. Salah satu persoalan yang mencuat adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat sejak usaha mulai beroperasi.

"Meskipun izin usaha lengkap sejak 2023, pihak pengusaha kurang melakukan sosialisasi kepada warga setempat. Memiliki izin saja tidak cukup jika mengabaikan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi," ujar Hidayat, Rabu (15/7).

Dalam mediasi tersebut, warga meminta langkah konkret untuk menekan dampak polusi udara. Tuntutan itu direspons pemilik usaha dengan komitmen membenahi fasilitas produksi.

Pengusaha berjanji membangun pagar pembatas yang representatif serta mendirikan gedung tertutup khusus untuk proses pengecatan. Seluruh aktivitas pengecatan nantinya dilakukan di ruang isolasi agar residu kimia dan bau cat tidak menyebar ke permukiman warga.

DPRD Sidoarjo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Balongbendo menegaskan akan mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut.



SIDAK - Anggota DPRD Sidoarjo Khoirul Hidayat saat sidak di perusahaan karoseri yang disegel oleh warga karena menimbulkan polusi.

Pengusaha diberi tengat waktu dua bulan untuk menuntaskan seluruh pembenahan.

"Pihak Kepolisian Sektor dan Camat akan memantau langsung perkembangannya di lapangan. Apabila dalam waktu dua bulan tidak ada itikad baik atau upaya perbaikan yang signifikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) siap mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha," lanjut politisi PDIP tersebut.

Menurut Khoirul, hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan warga sekitar menjadi syarat penting bagi terciptanya investasi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Kepala DPMPTSP Sidoarjo,

Ridho Prasetyo membenarkan usaha karoseri di Desa Seketi telah terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

"Secara legalitas, Nomor Induk Berusaha (NIB) milik usaha karoseri tersebut sudah terbit sejak tahun 2023," jelas Ridho.

Meski demikian, Ridho menegaskan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang melekat pada izin operasional. DPMPTSP tidak akan ragu membekukan hingga mencabut NIB apabila dalam masa evaluasi dua bulan ke depan pemilik usaha mengabaikan komitmen pembenahan lingkungan yang telah disepakati bersama warga. (ufl)

Green Port Perkuat Ketahanan Pangan

GRESIK, SURYA - Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik dinobatkan sebagai pelabuhan terbaik nasional dalam asesmen Green and Smart Port Initiatives (GSPi) ASRI 2026. Penghargaan itu sekaligus menegaskan pentingnya transformasi pelabuhan hijau dan cerdas untuk memperkuat sistem logistik serta ketahanan pangan Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Dermaga C Petrokimia Gresik, Rabu (15/7). Penilaian dilakukan melalui program GSPi ASRI 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama IDSurvey Group yang terdiri atas PT SUCOFINDO, PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan PT Surveyor Indonesia.

Program ini mengintegrasikan prinsip ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai standar pengelolaan pelabuhan berkelanjutan yang mengacu pada Green and Smart Port Guidelines 3.0/2023, regulasi nasional, serta praktik terbaik internasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port menjadi faktor penting untuk memperkuat efisiensi logistik pangan nasional sekaligus mendukung target ketahanan pangan.

"Pelabuhan adalah simpul strategis distribusi pangan. Transformasi menuju Green and Smart Port akan membuat logistik semakin efisien, biaya lebih kompetitif, sekaligus menghadirkan pelabuhan yang lebih ramah lingkungan. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing dan ketahanan pangan nasional," ujar Zulkifli Hasan.

Sebagai Strategic Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey dipercaya Kemenko Pangan menyusun kerangka kerja sekaligus melaksanakan asesmen berdasarkan Green and Smart Port Guidelines 3.0/2023.

Chief Executive Officer IDSurvey Arso-dono Soerono mengatakan, meningkatnya partisipasi pelabuhan menunjukkan semakin kuatnya kesadaran industri terhadap pentingnya keberlanjutan.

"Kepercayaan dari Kemenko Pangan merupakan kehormatan bagi IDSurvey. Kami berharap hasil asesmen ini mendorong semakin banyak pelabuhan Indonesia menjadi pelabuhan hijau berstandar internasional yang mendukung efisiensi logistik nasional," ujarnya.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna menegaskan pihaknya siap terus memperkuat implementasi Green and Smart Port melalui layanan testing, inspection, dan certification (ITC).

"SUCOFINDO bersama IDSurvey akan terus mendampingi penguatan standar, asesmen, dan peningkatan kapasitas pelabuhan agar transformasi menuju pelabuhan hijau dan cerdas berjalan konsisten serta meningkatkan daya saing nasional," kata Sandry.

Pada GSPi ASRI 2026, TUKS PT Petrokimia Gresik meraih nilai asesmen tertinggi secara nasional. Posisi berikutnya ditempati PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Krakatau Bandar Samudera. Penghargaan juga diberikan kepada PT Vale Indonesia, PT Pelindo Petikemas TPK Banjarmasin, PT Pelindo Petikemas Branch Tanjung Intan, dan Terminal Petikemas Bitung. (wfl)